

# DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP KINERJA INDUSTRI SUSU SEGAR DALAM NEGERI

## THE IMPACT OF ECONOMIC CRISIS TOWARD THE PERFORMANCE OF DOMESTIC DAIRY INDUSTRY

Dewa K.S.Swastika  
Nyak Ilham  
Ikin Sadikin

Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Sosial Ekonomi Pertanian di Bogor

### ABSTRACT

*The Indonesian Dairy Industry was well developed until mid 1997, due to some government protective policies, such as credit for imported dairy cattle, and domestic market security. Government determined the Milk Ratio (the ratio between domestic fresh milk and imported milk) that should be satisfied by the multinational milk processors (IPS) to run their milk processing factories. However, the domestic fresh milk production was not sufficient to meet the raw material for their factories. Therefore, in 1996, about 67% of raw materials has to be imported, especially from Australia and New Zealand. At least there were two factors resulting a high import of dairy product. First, the domestic dairy production capacity was limited; second the Indonesian dairy industry was considered as inefficient, so that the price of domestic fresh milk was claimed to be more expensive compared to imported milk. The economic crisis starting from mid 1997, resulting in a high price of imported dairy cattle and feed. On the other hand, this crisis also resulting in a significant increase in price of imported milk. Therefore, the demand for domestic fresh milk by IPS was significantly increased. The observations in 6 milk cooperatives (in East and West Java) showed that since economic crisis, all fresh milk offered by all cooperatives to IPS was absorbed. Even IPS provided some incentives (higher price and bonus) for the farmers who have a better quality of milk. There was also price adjustment given by IPS from about Rp. 600 ltr in 1996 97 to about Rp. 900 and then about Rp. 1100 ltr in 1998 99. However, the farmers was still complaining, because if they compare milk price to rice price, they recognize that before crisis 1 liter milk was equivalent to 0.6 kg rice, but after crisis 1 liter milk was equivalent to only 0.4 kg rice. The most important issue that should be anticipated is that "if exchange rate of Rupiah to US Dollar is increased, then imported milk will be cheaper, and IPS will tend to import*

*milk rather than buying domestic fresh milk. If this case is happening, it will be a nightmare to farmers who do dairy farm. Therefore, the development and transfer of the more efficient technology in dairy industry should be given a high priority.*

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan industri susu segar dalam negeri selama periode 1979-1996 tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang kondusif. Pada tahun 1983 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi. Dalam SKB tersebut Industri Pengolah Susu (IPS) diwajibkan menyerap susu segar dalam negeri (SSDN) sebagai pendamping dari susu impor untuk bahan baku industrinya. Proporsi penyerapan SSDN ditetapkan dalam bentuk "rasio susu", yaitu perbandingan antara pemakaian SSDN dan susu impor.

Untuk mendukung perkembangan produksi SSDN, selain menjamin pemasaran, pemerintah juga mengupayakan bibit sapi perah unggul melalui impor. Selama periode 1979-1995, impor sapi perah oleh pemerintah sebanyak 87.885 ekor (GKSI, 1996). Sapi perah impor tersebut disalurkan kepada peternak melalui koperasi primer dalam bentuk kredit. Peternak mengangsur kredit tersebut dengan sebagian dari hasil penjualan susu. Riethmuller et al. (1999) mensinyalir bahwa intervensi pemerintah telah menciptakan inefisiensi usaha peternakan sapi perah. Namun demikian, intervensi tersebut dapat ditolerir, karena selama ini usaha peternakan sapi perah lebih banyak ditujukan pada pencapaian tujuan sosial, yaitu penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Dalam era pasar bebas usaha peternakan sapi perah harus diupayakan menjadi efisien, agar tetap bisa bersaing.

Dengan adanya krisis ekonomi, harga susu manufaktur dan bahan baku impor meningkat sangat tajam dan terjadi kelangkaan susu, sehingga IPS kekurangan bahan baku. Kondisi ini secara relatif dapat meningkatkan daya saing produk SSDN yang selama ini harganya lebih mahal. Hal ini tercermin dari penyerapan semua susu segar dalam negeri oleh IPS dengan harga yang telah disesuaikan. Jika sebelum krisis harga susu segar sekitar Rp 560/ltr, maka pada tahun 1999 telah menjadi sekitar Rp 1100/ltr. Bahkan IPS menyediakan insentif berupa harga yang lebih tinggi dan bonus bagi peternak yang susunya berkualitas baik. Namun demikian, peternak merasa belum ada perbaikan, karena jika dibandingkan dengan harga beras, pada saat sebelum krisis harga 1 liter susu setara dengan 0,6 kg beras, sedangkan setelah krisis harga 1 liter susu hanya setara dengan 0,4 kg beras.

Disamping itu, kenaikan harga output diikuti pula oleh kenaikan biaya produksi, terutama harga pakan yang merupakan bagian terbesar biaya

produksi. Jika tidak ada upaya untuk meningkatkan efisiensi terutama dalam hal meningkatkan produktivitas, maka posisi peternak sapi perah dalam negeri akan sama seperti sebelum krisis. Artinya tambahan nilai dari kenaikan harga susu lebih rendah dari nilai kenaikan biaya produksi. Selain faktor harga di atas, lingkungan perdagangan yang berubah juga diduga akan mempengaruhi kinerja usaha peternakan sapi perah di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai kesepakatan dengan IMF, sejak tahun 1998 mekanisme impor dan perdagangan susu sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Realisasi dari kebijakan tersebut ialah dicabutnya SKB tentang Bukti Serap dan penurunan bea tarif impor bahan baku susu menjadi 5%.

Kebijakan baru ini di satu pihak bisa memacu peternak untuk meningkatkan efisiensi, tetapi di lain pihak dapat mengakibatkan posisi peternak dan koperasi lebih terpuruk, terutama bila nilai kurs Rupiah menguat. Jika nilai kurs Rupiah terhadap US Dollar makin menguat, maka harga susu dalam negeri akan menjadi lebih mahal sehingga IPS akan cenderung mengimpor bahan baku susu dari pada membeli SSDN. Jika hal ini yang terjadi, maka peternak dan koperasi akan mengalami nasib yang sangat buruk. Oleh karena itu, perlu dicari upaya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sapi perah agar dapat meningkatkan daya saing SSDN terhadap susu impor. Disamping itu, perlu ada upaya pengolahan susu segar di tingkat koperasi, minimal pengawetan dan pengemasan dalam bentuk susu segar dalam kaleng, botol, atau kotak.

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang dampak dari krisis ekonomi terhadap kinerja dan prospek pengembangan usaha sapi perah di Indonesia, berdasarkan hasil studi kasus di dua propinsi sentra produksi yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat.

## **METODOLOGI**

### **Kerangka Pemikiran**

Adanya krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 diduga mempunyai dampak yang serius, baik dampak yang negatif maupun yang positif. Dampak negatif dan positif dari krisis ekonomi yang diperkirakan terjadi pada usaha susu sapi perah ialah:

- (i) Meningkatnya harga pakan dan biaya operasional secara tajam mengakibatkan tingginya biaya produksi SSDN.
- (ii) Melemahnya nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing menyebabkan impor sapi perah menjadi sangat mahal.

- (iii) Harga susu impor dari luar negeri, berupa Skim Milk Powder (SMP) dan Anhydrous Milk Fat (AMF), juga menjadi sangat mahal, sehingga membuka peluang penyerapan yang lebih tinggi bagi SSDN.

Dua butir pertama merupakan dampak negatif dari krisis ekonomi yang diduga akan melemahkan daya saing SSDN terhadap susu impor. Sebaliknya, butir (iii) merupakan dampak positif dari krisis ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing SSDN.

Agar usaha susu sapi perah di dalam negeri tetap menarik, maka perlu dicari upaya menekan dampak negatif dari krisis yang terjadi, sehingga kenaikan biaya produksi SSDN tidak melebihi kenaikan harga susu impor.

Kredit sapi perah yang pernah dilakukan melalui BUKOPIN (Bank Umum Koperasi Indonesia) dan Krekop (Kredit Koperasi) dengan bunga murah perlu digiatkan kembali (Taryoto et al., 1993). Selain itu, penyediaan kredit yang lebih besar dengan bunga yang ringan (misalnya KUK) sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha peternakan sapi perah dalam negeri.

### **Cakupan Analisis.**

Cakupan analisis dalam tulisan ini adalah tingkat nasional dan tingkat provinsi, dengan studi kasus di enam koperasi di dua provinsi produsen utama yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Data primer berasal dari kelompok peternak, koperasi primer susu, dan KUD yang mengelola peternak sapi perah di dua provinsi sentra produksi, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan data sekunder berasal dari GKSI, BPS, Dit. Bina Usahatani Ternak, Dinas Peternakan, BIB, serta instansi terkait.

## **DAMPAK KRISIS TERHADAP INDUSTRI PERSUSUAN NASIONAL**

### **Populasi Sapi Perah**

Perkembangan populasi sapi perah sebelum krisis secara nasional cukup baik, yaitu dari 334.021 ekor pada tahun 1994 menjadi 347.989 ekor pada tahun 1996, atau tumbuh sekitar 2,1%/tahun (Lampiran 1). Krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997 telah mengakibatkan populasi sapi perah menurun cukup nyata dari 347.989 ekor pada tahun 1996 menjadi 321.992 ekor pada tahun 1998 atau turun sekitar 3,7%/tahun.

Pengembangan sapi perah terkonsentrasi di Pulau Jawa, dimana sekitar 95% dari populasi sapi nasional berada di 4 provinsi di Jawa. Di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat saja, pada tahun 1996 terdapat 233.298 ekor sapi perah atau sekitar 67% dari populasi nasional, meskipun kemudian menurun menjadi 203.852 ekor (sekitar 63% dari populasi nasional) pada tahun 1998. Terpusatnya Pulau Jawa (terutama Jawa Timur dan Jawa Barat) sebagai basis

peternakan sapi perah disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana, terutama adanya IPS, serta pasar/konsumen yang cukup mendukung. Namun demikian, adanya krisis ekonomi telah mengakibatkan populasi sapi perah di Jawa Barat turun cukup tajam yaitu dari 119.744 ekor pada tahun 1996 menjadi 79.234 ekor pada tahun 1998, atau turun sekitar 16,9%/tahun.

Berbeda dengan tingkat nasional dan Pulau Jawa secara keseluruhan, di Jawa Timur selama periode 1994-1998 pertumbuhan populasi sapi perah masih positif, yaitu sekitar 3,85%/tahun. Bahkan setelah krisis (1997-1998) populasinya meningkat sebesar 5,5%/tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya keyakinan bahwa sapi perah merupakan usaha peternakan yang relatif tahan terhadap gejala krisis di Jawa Timur, sehingga makin banyak petani yang beralih ke usaha ternak sapi perah. Penyebab lainnya ialah adanya kenaikan harga susu yang menarik bagi peternak serta adanya pendapatan harian dari susu.

### **Produksi Susu Segar Dalam Negeri**

Produksi susu segar di Indonesia pada tahun 1994 sekitar 426.727 ton, meningkat menjadi 441.163 ton pada tahun 1996, kemudian menurun menjadi 375.382 ton pada tahun 1998, atau menurun sekitar 7,5%/tahun selama periode 1996-1998. Penurunan tersebut terjadi akibat adanya krisis moneter sehingga biaya pengadaan sapi bibit impor dan harga pakan konsentrat bermutu (yang bahan bakunya masih mengandalkan komponen impor) mengalami kenaikan cukup berarti.

Seiring dengan produksi nasional, adanya krisis ekonomi juga mengakibatkan produksi susu di Jawa Barat mengalami penurunan dari 225.168 ton pada tahun 1996 menjadi 148.992 ton pada 1998, atau selama krisis mengalami penurunan sekitar 16,9%/tahun. Padahal sebelum krisis ekonomi produksi susu meningkat dari 215.640 ton pada tahun 1994 menjadi 225.168 ton pada tahun 1996, atau meningkat sekitar 2,2%/tahun.

Sementara itu di Jawa Timur, produksi susu selama periode 1994-1998, terutama pada saat krisis mengalami peningkatan. Lampiran 1 menunjukkan bahwa produksi susu Jawa Timur pada 1994 baru mencapai 129.542 ton meningkat menjadi 149.902 ton pada 1998, atau rata-rata meningkat sebesar 1,8%/tahun. Bahkan setelah krisis peningkatan tersebut mencapai 5,9%/tahun. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa usaha ternak sapi perah di Jawa Timur diyakini merupakan usaha yang tahan terhadap gejala krisis ekonomi.

### **Impor dan Konsumsi Susu**

Selama ini bahan baku yang digunakan IPS berasal dari dua sumber, yaitu SSDN dan bahan baku impor. Secara garis besar jenis bahan baku susu

yang biasa diimpor adalah *Anhydrous Milk Fat* (AMF), *skim milk powder* (SMP) *full cream milk powder* (FCMP), *butter milk powder* (BMP), lactosa, dan vitamin. Selain mengimpor bahan baku susu tersebut, Indonesia juga mengimpor produk susu olahan seperti mentega, keju, yoghurt, dan produk susu lainnya. Dari Lampiran 1 terlihat bahwa perkembangan impor bahan baku susu mengalami penurunan. Pada tahun 1994 volume impor mencapai 56.637 ton atau setara 559.989 ton susu segar. Pada tahun 1996, impor tersebut meningkat menjadi 66.221 ton, atau meningkat sekitar 8,5%/tahun. Setelah krisis (1998), impor menurun lagi menjadi 37.846 ton (setara 381.372 ton susu segar), atau rata-rata mengalami penurunan sebesar 21%/tahun.

Total konsumsi susu selama periode 1994-1998 sangat fluktuatif. Sebelum krisis, konsumsi meningkat dari 0,91 juta ton pada tahun 1994 menjadi 1,13 juta pada 1996. Pada tahun-tahun berikutnya khususnya saat krisis moneter, konsumsi mengalami penurunan, yaitu 1,05 juta ton pada tahun 1997, dan menurun menjadi 0,84 juta ton pada 1998, atau dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan konsumsi sekitar 12,5%/tahun.

Hal yang sama terjadi pada tingkat konsumsi susu per kapita yang mengalami penurunan sekitar 13,6%/tahun selama periode 1996-1998. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi. Padahal sebelum krisis konsumsi perkapita pertahun meningkat dari 4,75 kg pada tahun 1994 menjadi 5,72 kg pada tahun 1996, atau meningkat sekitar 10,2%/tahun.

Sementara itu volume penyerapan SSDN oleh IPS dalam periode yang sama mengalami peningkatan, yaitu dari 301.410 ton pada 1994 menjadi 313.079 ton pada 1998. Kontribusi SSDN terhadap bahan baku IPS mengalami peningkatan dari 35,0% pada tahun 1994 menjadi 38,6% pada tahun 1997 dan meningkat lagi menjadi 45,1% pada tahun 1998. Peningkatan serapan SSDN selama krisis disebabkan oleh tingginya harga bahan baku susu impor.

## **DAMPAK KRISIS TERHADAP USAHA SAPI PERAH RAKYAT**

### **Perbibitan**

Mahalnya sapi perah impor akibat krisis ekonomi menyebabkan kegiatan impor sapi bibit yang selama ini dilakukan pemerintah menjadi terhenti. Sebelum krisis, harga seekor sapi perah bibit asal impor hanya Rp 2,2 juta (1000 US \$). Setelah krisis meningkat mencapai Rp 7 juta. Sedangkan di dalam negeri harga bibit sapi perah berkisar antara 3-5 juta rupiah, tergantung pada tingkat umur dan kemampuan produksi susunya.

Untuk mengatasi mahalnya harga bibit impor, usaha peternakan sapi perah rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi susu, menggunakan sapi

turunan yang ada yang perkembangbiakannya sebagian besar menggunakan program inseminasi buatan (IB). Selama ini upaya pengadaan bibit sapi perah telah dilakukan di unit-unit pembibitan pada beberapa koperasi primer. Sebelum krisis, selain bersumber dari impor, pengadaan bibit di tingkat peternak bersumber dari pembesaran yang dilakukan peternak sendiri, pembelian dari pedagang sapi perah, dan kredit dari koperasi. Sapi bibit yang dikreditkan koperasi berasal dari unit pembibitan koperasi atau pembelian pedet milik peternak kemudian dibesarkan di unit pembibitan koperasi. Koperasi yang telah memiliki unit pembibitan adalah (KPSBU Lembang, KPBS Pangalengan, KUD Tanjung Sari dan KOPSAE Pujon). Kegiatan pembibitan sudah dimulai sejak 1993. Dalam menghadapi krisis ekonomi, beberapa koperasi primer lebih meningkatkan dan memantapkan usaha unit pembibitan di lingkungan wilayah kerjanya.

Dalam sistem perbibitan sapi perah di Indonnesia, peran pemerintah relatif sudah berkurang. Sebagian besar peran tersebut telah ditangani oleh koperasi (GKSI). Instansi pemerintah yang terkait langsung dalam mendukung pengadaan bibit ternak, termasuk sapi perah adalah Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang di Jawa Barat dan Balai Inseminasi Buatan Singosari di Jawa Timur, Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) Batu Raden di Jawa Tengah, dan Balai Embrio Ternak (BET) di Cipelang Jawa Barat. Dengan demikian, secara tidak langsung dampak krisis meningkatkan kinerja sistem perbibitan sapi perah dalam negeri. Peran pemerintah sendiri semakin berkurang. Peran pemerintah lebih mengarah pada strategi kebijakan, dan penelitian.

### **Pakan Ternak**

Pakan ternak terbagi dalam dua kelompok, yaitu pakan hijauan dan pakan konsentrat. Pakan konsentrat yang diformulasi dari berbagai bahan pakan sebagian masih berasal dari impor. Sementara itu pakan hijauan berasal dari hasil budidaya, mencari di lahan-lahan terbuka, dan berasal dari limbah pertanian. Pengadaan pakan konsentrat untuk peternakan sapi perah rakyat sebagian besar dilakukan oleh koperasi susu melalui unit mixer pakan konsentrat yang ada.

Pengadaan pakan konsentrat dari pabrik pakan (*feed mill industry*) seperti halnya pada industri perunggasan tidak banyak berperan dalam usaha sapi perah. Hal ini antara lain disebabkan adanya proteksi dari pihak koperasi (GKSI), dan harga pakan dari feedmill cukup mahal dibandingkan dengan pakan dari koperasi. Sebagai contoh, pada tahun 1999 harga pakan produksi koperasi susu berkisar antara Rp 500,- sampai Rp 600,- per kilogram, sedangkan produksi Japfa Comfeed Rp 1.359/kg.

Kendala dalam pengadaan pakan konsentrat masih sangat tergantung pada bahan baku impor, yaitu wheat pollard, bungkil kedele, dan jagung. Walaupun pada kondisi tertentu pollard dapat disubstitusi dengan dedak padi, namun berdampak terhadap kuantitas dan kualitas produk susu yang dihasilkan.

Naiknya harga pakan akibat krisis ekonomi segera dirasakan oleh peternak, sedangkan kenaikan harga susu tidak demikian. Akibatnya sampai dengan 1998 banyak peternak yang menjual pedet untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaknya. Bahkan di Jawa Barat ada beberapa peternak yang menjual semua ternaknya dan beralih ke usaha lain. Harga susu baru dinaikkan menjadi hampir Rp 1.100,/ltr pada Juli 1998, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan harga pakan dan susu segar di tingkat peternak, 1997-1998.

Tahun/Bulan	Harga Pakan (Rp/kg)	Harga Susu Segar (Rp/ltr)	Rasio harga pakan dan susu
1997: Agustus	290	543	1,9
September	290	541	1,9
Oktober	290	543	1,9
Nopember	290	543	1,9
Desember	290	548	1,9
1998 : Januari	317	625	2,0
Pebruari	313	680	2,2
Maret	415	784	1,9
April	436	795	1,8
Mei	435	785	1,8
Juni	432	784	1,8
<b>Juli</b>	<b>437</b>	<b>1056</b>	<b>2,4</b>
Agustus	491	1047	2,1
September	491	1037	2,1
Oktober	501	1042	2,1
Nopember	519	1045	2,0
Desember	584	1139	2,0

Sumber: Laporan Tahunan KUD Tanjungsari, 1997 dan 1998.

Untuk mengatasi kenaikan harga pakan, beberapa koperasi seperti KOPSAE dan KUD Tanjung Sari memberikan subsidi harga pakan yang dijual ke anggota. Dana subsidi yang dipakai bersumber dari bonus yang diterima oleh pihak koperasi dari IPS atau bagian dari keuntungan (SHU) koperasi. Pengaturan stok bahan baku pakan juga merupakan upaya untuk memproduksi pakan dengan harga yang relatif murah.

Dengan adanya subsidi, rasio harga pakan dan susu mencapai komposisi ideal saat ini, yaitu 1 : 2. Kondisi aktual harga pakan berkisar Rp 500,- sampai Rp 620,- per kg., dengan harga susu Rp 1000 – Rp 1240,- per liter sudah memenuhi kondisi idial. Jika harga susu berada dibawah atau harga pakan berada diatas kisaran tersebut akan merugikan bagi peternak, demikian pula sebaliknya. Namun demikian, subsidi pakan ini hanya bersifat pemecahan masalah jangka pendek.

Permasalahan pakan hijauan berkaiatan dengan kemarau panjang. Pada saat kemarau biaya pakan menjad meningkat, karena peternak harus membeli atau mencari pakan dengan jarak yang relatif jauh. Selama ini ada pengadaan hijauan pakan yang dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan lahan PT. Perhutani dengan sistem sewa. Nilai sewa tersebut bervariasi pada tiap daerah. Adanya krisis ekonomi yang diikuti krisis sosial menyebabkan PT. Perhutani tidak lagi menagih biaya sewa tersebut. Bagi peternak tidak adanya tagihan ini meragukan mereka apakah kerjasama ini masih bisa dilanjutkan.

### C. Kelangsungan Usaha

Pada umumnya sapi perah yang dipelihara jenis turunan FH (Friesch Holland). Hanya sebagian peternak di Lekok Pasuruan yang memelihara sapi perah persilangan FH dengan Sapi Jawa (Grati). Kebanyakan peternak berusaha pada skala pemilikan sapi produktif antara 2 – 4 ekor. Untuk mencapai efisiensi, diharapkan skala pemilikan dapat ditingkatkan menjadi sekitar 6 ekor atau lebih. Hasil penelitian Kuntara (1994) di Pangalengan, Rohbiah (1995) di Garut dan Bogor, dan Suja'l (1996) di Tulung Agung menyatakan bahwa usaha peternakan sapi perah akan semakin efisien dengan bertambah besarnya skala usaha. Skala pemilikan 8 – 13 ekor lebih efisien dari skala pemilikan 4 – 7 ekor. Selanjutnya skala pemilikan 4 – 7 ekor lebih efisien dari pemilikan 1 – 3 ekor.

Untuk meningkatkan skala usaha, peternak menghadapi masalah ketersediaan modal untuk pembelian bibit dan keterbatasan lahan untuk pengadaan pakan hijauan. Oleh karena itu dukungan perkreditan dalam sistem perbibitan sapi perah serta pemanfaatan lahan PT. Perhutani atau lahan lainnya untuk pengadaan pakan hijauan diharapkan dapat mendukung perkembangan sapi perah di Indonesia.

Dampak positif dari ketidakseimbangan harga pakan dan harga susu adalah upaya peternak meningkatkan efisiensi produksi. Awalnya ternak yang produktivitasnya rendah dengan alasan non-ekonomi masih tetap dipelihara. Dengan adanya krisis, peternak menjual semua ternak yang tidak produktif untuk menutupi kebutuhan biaya pakan atau menggantikannya dengan ternak yang lebih produktif. Kriteria yang

digunakan dalam menyeleksi ternak yang tidak produktif adalah: rataan produksi kurang dari 10 liter/ekor/hari dan sudah delapan kali beranak. Penjualan ternak non produktif menyebabkan populasi ternak di Jawa Barat cenderung menurun, namun produktivitasnya cenderung meningkat.

Sebaliknya, di Jawa Timur ketahanan usaha sapi perah menghadapi kondisi krisis ditambah dengan adanya kenaikan harga susu pada Juli 1998 menyebabkan usaha ini semakin bertahan. Bahkan banyak peternak baru yang mengajukan menjadi anggota koperasi dengan kepemilikan yang relatif kecil (2 ekor). Namun demikian, semakin bertambahnya peternak dengan skala pemilikan yang kecil menimbulkan masalah dalam efisiensi usaha. Oleh karena itu respon peternak terhadap usaha ini hendaknya diikuti dengan dukungan fasilitas kredit pengadaan bibit dan sarana pengadaan pakan hijauan. Walaupun usaha sapi perah mampu bertahan menghadapi krisis, namun jika dibandingkan dengan sebelum krisis terjadi penurunan nilai tukar (Tabel 2).

Tabel 2. Nilai tukar susu terhadap pakan dan beras sebelum dan sesudah Krisis ekonomi pada usaha peternakan sapi perah rakyat.

Komoditas	Sebelum krisis (1996)	Setelah krisis (1998)
1. Harga pakan konsentrat (Rp/kg)	230	575
2. Harga susu segar (Rp/ltr)	560	1100
3. Harga beras (Rp/kg)	900	3000
4. Rasio :		
a. Susu : Pakan	2,4	1,9
b. Susu : Beras	0,6	0,4

Sumber: Data primer dari Koperasi dan Kelompok Tani

### Penanganan dan Pemasaran Hasil

Sekitar 88 persen produksi susu dari usaha peternakan sapi perah anggota koperasi dipasarkan ke IPS (multinasional) melalui koperasi. Selebihnya dipasarkan ke industri pengolahan nasional (8%), diolah dalam bentuk susu pasteurisasi oleh koperasi primer (2%), dan dipasarkan langsung melalui lopper susu (1%) ke konsumen. Khusus susu afkir (BJ rendah) selain dipasarkan langsung ke konsumen ada juga yang digunakan sebagai bahan baku industri rumah tangga, yaitu untuk pembuatan karamel, kerupuk, dan dodol. Bagi peternak yang bukan anggota koperasi (jumlahnya relatif sedikit) pemasarannya dilakukan melalui lopper atau langsung oleh peternak ke konsumen. Secara lebih jelas skema jalur pemasaran SSDN dapat dilihat pada Lampiran 2.

Adanya krisis ekonomi diantisipasi oleh beberapa koperasi dengan meningkatkan penjualan susu olahan (*pasteurisasi*). Pengolahan tersebut sebenarnya masih dapat divariasikan lagi dalam bentuk yoghurt, keju, dan produk lainnya. Saat ini Dinas Peternakan Kabupaten Malang sedang memperkenalkan alat pembuat keju dengan kapasitas 30 kg/hari. Investasi yang dibutuhkan tiap unit pengolahan keju bernilai Rp 25 juta, dan telah ada investor yang ingin membantu pengadaan alat tersebut. Meningkatnya daya beli konsumen yang diikuti dengan promosi untuk minum susu segar dan susu olahan koperasi, diharapkan mampu meningkatkan volume jual koperasi. Meningkatnya volume jual koperasi dalam bentuk susu olahan, dapat meningkatkan nilai tambah bagi koperasi, dan nilai tambah tersebut diharapkan juga dirasakan oleh peternak. Jika pangsa penjualan ini terus meningkat, maka posisi tawar koperasi pada IPS menjadi meningkat.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara nasional, sampai dengan tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) industri persusuan nasional mengalami pertumbuhan yang positif. Adanya krisis ekonomi mengakibatkan populasi sapi perah, produksi SSDN, dan konsumsi susu mengalami penurunan.
2. Kenaikan harga susu impor akibat krisis moneter, menyebabkan meningkatnya daya saing SSDN di tingkat IPS. Hal ini terlihat dari meningkatnya pangsa serapan SSDN sebagai bahan baku industri pengolahan susu, relatif terhadap susu impor.
3. Krisis ekonomi juga menyebabkan harga bibit sapi perah meningkat tajam, terutama yang berasal dari impor. Hal ini memicu kemandirian sistem perbibitan sapi perah di Indonesia.
4. Untuk mendukung sistem perbibitan, diperlukan fasilitas kredit sapi perah seperti halnya KUT pada usahatani pangan dan hortikultura. Pengembangan bibit sapi perah hendaknya didukung dengan penelitian pemuliaan dan nutrisi, sehingga akan diperoleh sapi yang mampu berproduksi tinggi dengan menggunakan bahan baku pakan lokal.
5. Kualitas pakan yang berbanding lurus dengan harganya merupakan faktor yang menentukan tingkat produksi susu dalam usaha peternakan sapi perah. Agar usaha ini dapat memberikan keuntungan bagi peternak, maka dalam mengambil kebijakan harga susu hendaknya tetap memperhatikan harga pakan. Pada kondisi kualitas tertentu tingkat harga susu, minimal dua kali harga pakan konsentrat.

6. Makin mengecilnya skala pemilikan sapi perah pada pasca krisis memerlukan upaya peningkatan skala usaha, agar efisiensi usaha meningkat. Untuk itu diperlukan fasilitas kredit untuk pengadaan bibit dan sarana pengadaan saprodi lainnya.
7. Meningkatnya pangsa penjualan koperasi primer dalam bentuk susu olahan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah yang diterima koperasi dan peternak, serta meningkatkan posisi tawar koperasi ke IPS. Untuk itu diperlukan promosi lebih luas kepada masyarakat tentang manfaat minum susu segar produksi koperasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

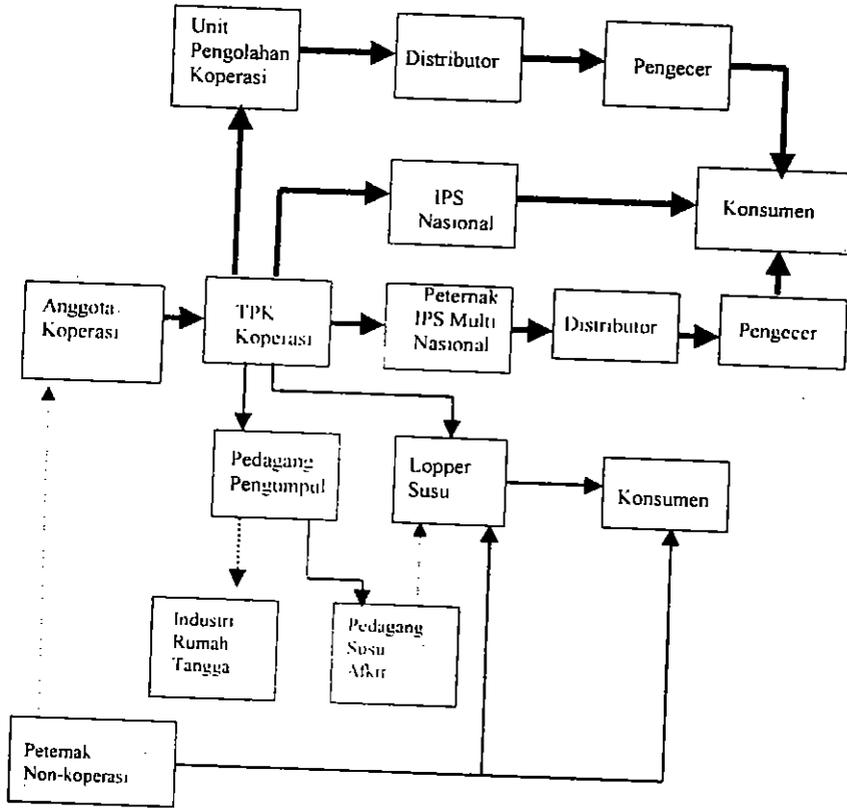
- Anonimous. 1998. Laporan Tahunan Koperasi Unit Desa Tanjungsari Tahun Buku 1997. KUD Tanjungsari Sumedang.
- Anonimous. 1999. Laporan Tahunan Koperasi Unit Desa Tanjungsari Tahun Buku 1998. KUD Tanjungsari Sumedang.
- Ditjen-Nak. 1985-1999. Buku Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan –Departemen Pertanian. Jakarta.
- GKSI. 1996. Strategi GKSI dalam Meningkatkan Fungsi Koperasi Persusuan Menghadapi Pasar yang Kompetitif. Makalah disampaikan pada Lokakarya Kebijakan Persusuan di Indonesia. Kerjasama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dan ACIAR di Bogor, 18 Desember 1996.
- Kuntara, I. 1994. Analisis Pendapatan Usaha Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Skripsi Fakultas Peternakan IPB. Bogor.
- Monke, E.A. and S.K. Pearson. 1989. The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development. Cornell University Press. Ithaca and London.
- Reithmuller, P., J. Chai, D. Smith, B. Hutabarat, B. Sayaka, and Y. Yusdja. 1999. The Mixing Ratio in Indonesian Dairy Industry. *Agricultural Economic*. Vol.20 (1999) p. 51-56.
- Robiah, D. 1995. Analisis Biaya Sumberdaya Domestik pada Usaha Ternak Sapi Perah di Daerah Dataran Tinggi dan Dataran Rendah Provinsi Jawa Barat. Skripsi Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Suja'i, A.Y.I. 1996. Analisis efisiensi Ekonomi Relatif dan Perolehan Skala pada Usahatani Sapi Perah (Studi kasus di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung). Tesis Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. Malang.
- Taryoto, A.H., B. Rachmah, Sunarsih, A. Agustian, dan P. Setiadi. 1993. Analisis Perbandingan Kelembagaan pada PIR Unggas dan Susu. Laporan Teknis. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

# AGRO EKONOMI

Lampiran 1. Perkembangan kinerja industri susu segar dalam negeri, 1994-1998

URAIAN	TAHUN					Tren/th	Tren/th
	1994	1995	1996	1997	1998	1994-96	1996-98
<b>Populasi (000 ekor)</b>							
- JABAR	114681	118753	119744	95224	79234	2.21	-16.92
- JATIM	107216	108299	113554	118121	124618	2.96	4.87
- PROVINSI Lain	112124	114282	114691	121026	118140	1.14	1.50
- INDONESIA	334021	341334	347989	334371	321992	2.09	-3.74
<b>Produksi SSDN (ton)</b>							
- JABAR	215640	223295	225168	200949	148992	2.21	-16.92
- JATIM	129542	129634	134037	139326	149902	1.73	5.92
- PROVINSI Lain	81545	80513	81958	83389	76488	0.25	-3.34
- INDONESIA	426727	433442	441163	423664	375382	1.69	-7.46
<b>Konsumsi/kapita (kg/th)</b>							
- JABAR	4.94	5.02	5.06	4.34	5.82	1.21	7.51
- JATIM	3.06	3.20	3.22	3.34	3.47	2.61	3.88
- PROVINSI Lain	Tad	Tad	tad	Tad	tad		
- INDONESIA	4.75	6.99	5.72	5.52	4.16	10.21	-13.64
<b>Konsumsi total (ton)</b>							
- JABAR	174250	178180	202490	175830	240587	8.10	9.41
- JATIM	119349	129634	243610	139326	144927	52.06	-20.25
- PROVINSI Lain	612901	1049339	679300	734844	458186	5.42	-16.28
- INDONESIA	906500	1353900	1125400	1050000	843700	12.07	-12.52
<b>Impor B. Baku Susu</b>							
- Volume (ton)	56637	87834	66221	57012	37846	8.46	-21.42
- Volume (ton SSS)	559989	858406	654742	559696	381372	8.46	-20.88
- Nilai Impor (\$000)	97137	194908	152102	113004	69057	28.29	-27.30
<b>Impor Susu Total</b>							
- Volume (ton)	68360	858407	654742	559696	381372	428.89	-20.88
- Volume (ton SSS)	601528	1005683	788573	734918	587516	15.55	-12.75
- Nilai Impor (\$000)	110293	221267	189857	148537	112908	36.07	-20.26
<b>Total B.Baku (ton SSS)</b>	861399	1179646	979702	910866	694451	6.87	-14.56
<b>Susu diserap IPS (ton)</b>	301410	321240	324960	351170	313079	3.91	-1.83
<b>Rasio Serap/Prod.</b>	70.63	74.09	73.66	82.89	83.40		
<b>R. Impor/B. Baku</b>	65.01	72.77	66.83	61.45	54.92		

Lampiran 2. Pola pemasaran susu segar dalam negeri di Indonesia.



Keterangan : KUTT SM, SAE-PUJON, KPSBU, dan KUD T Sari = 100% ke IPS,  
 KPBS dan KUD Batu = ke IPS dan Olah sendiri